

## ABSTRAK

**Maghfur Hidayat Nur**, NIM. 1751144014. 2016. “*Kebijakan Kiai dalam Pengembangan Pendidikan Formal Di Pesantren (Studi Multi Situs di MA Al-Marif Pondok Pesantren Panggung dan SMAI Sunan Gunung Jati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien*” Tesis Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Program Pascasarjana (S-2) IAIN Tulungagung di bawah bimbingan oleh **Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag dan Dr. Maftukhin, M.Ag.**  
Kata Kunci: Kebijakan Kiai, Pengembangan.

Penelitian dalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan yang kuat di pesantren untuk melakukan konsolidasi organisasi kelembagaan, khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Perkembangan kelembagaan pesantren ini, terutama disebabkan adanya diversifikasi pendidikan yang diselenggarakannya, yang juga mencakup madrasah dan sekolah umum yang menganut sistem yang lebih rasional, demokratis dan terbuka. Pembagian wewenang dalam tata laksana kepengurusan diatur secara fungsional, sehingga akhirnya semua harus diwadahi dan digerakkan menurut tata aturan manajemen modern. Setiap unit kegiatan ditangani oleh penanggung jawab masing-masing, dimana setiap penanggung jawab tersebut secara hirarkis bertanggung jawab kepada unit yang lebih tinggi. Setiap unit diberi semacam otonomi untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Kepemimpinan yayasan dengan struktur organisasinya merupakan kepemimpinan kolektif dengan tugas dan wewenang masing-masing badan dalam struktur yayasan.

Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan kiai dalam penyusunan agenda pengembangan pendidikan formal di Madrasah Aliyah Al Ma’arif dan SMA Islam Sunan Gunung Jati? (2) Bagaimana formulasi kebijakan kiai dalam pengembangan pendidikan formal di Madrasah Aliyah Al Ma’arif dan SMA Islam Sunan Gunung Jati? (3) Bagaimana adopsi kebijakan kiai dalam pengembangan pendidikan formal di Madrasah Aliyah Al Ma’arif dan SMA Islam Sunan Gunung Jati. (4) Bagaimana implementasi kebijakan kiai dalam pengembangan pendidikan formal di Madrasah Aliyah Al Ma’arif dan SMA Islam Sunan Gunung Jati? (5) Bagaimana evaluasi dari kebijakan kiai dalam pengembangan pendidikan formal di Madrasah Aliyah Al-MA’arif dan SMA Islam Sunan Gunung Jati?

Tesis ini bermanfaat untuk memberikan khazanah keilmuan teori-teori dan konsep tentang pengambilan kebijakan serta sebagai alternatif solusi proses pengambilan kebijakan dalam suatu organisasi di Pondok Pesantren. Serta untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren dalam menentukan kebijakan yang berorientasikan kepada pengembangan

Metode penelitian yang digunakan: (1) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldnote*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan rancangan multi-situs, (2) Kehadiran peneliti di lapangan adalah suatu keharusan yang berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, (3) Tempat penelitian adalah di Pondok Pesantren Panggung Tulungagaung dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Ngunut

Tulungagung (4) Sumber data penelitian dibagi menjadi empat; *people* (orang), *place* (tempat), *paper* (kertas/dokumen). Ketiga sumber data tersebut digunakan untuk saling melengkapi informasi dan data, (5) Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi, (6) Peneliti menganalisa data dengan analisis kasus tunggal yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah analisis situs tunggal dilakukan analisis multi situs, (7) Untuk memeriksa validitas data, peneliti melakukan perpanjangan waktu penelitian, triangulasi, mengumpulkan banyak referensi, mengkaji ulang data yang akan dibuktikan, dan melakukan klarifikasi kepada para informan.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: (1) kebijakan kiai dalam penyusunan agenda pengembangan pendidikan formal dimulai dengan pengamatan lingkungan, masukan dari pimpinan lembaga serta inisiatif kiyai sendiri. Pokok permasalahan akan terlebih dahulu di musyawarahkan dalam lingkup lembaga, selanjutnya diteruskan dalam rapat besar atau bisa langsung pada ketua yayasan dan pengasuh. Sedangkan perumusan masalah kebijakan kiyai di pondok pesantren Ngunut diperoleh melalui banyak sumber diantaranya masukan pengurus lembaga pendidikan formal, pengurus komite, pengurus yayasan serta dewan Pembina pondok pesantren Hidayatul Muhtadien (DP3HM). (2) formulasi kebijakan kiyai dalam pengembangan pendidikan formal pondok pesantren panggung dan hidayatul Muhtadi'ien dalam hal ini MA Ma'arif dan SMA Islam Gunung Jati berorientasi pada hal-hal yang mendesak dan penting yakni terkait dengan peningkatan mutu pendidikan melalui, pengembangan kurikulum, sarana prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pendidik dan tenaga kependidikan. (3) adopsi kebijakan pengembangan pendidikan dilakukan dengan pengesahan kebijakan dari permasalahan yang diutamakan, legitimasinya terletak pada kiai/pengasuh pondok dan kiai tidak hanya mengandalkan inisiatif sendiri melainkan masukan dari pengurus lembaga maupun para pengasuh yang lain. (4) implementasi kebijakan kiai antaralain; kiai memberi wewenang kepada lembaga untuk melaksanakan kebijakan kiai yang telah diputuskan, pelaksanaan kebijakan tersebut disosialisasikan melalui rapat dengan lembaga guna memantapkan alur informasi atas kebijakan yang yang akan dilaksanakan. (5) evaluasi kebijakan kiai dalam pengembangan pendidikan formal di pesantren melalui rapat bersama pengurus yayasan, laporan kerja dan melalui observasi. Selain itu bisa juga diukur dari semakin banyaknya masyarakat yang mempercayakan putra putrinya untuk belajar di pondok pesantren serta melakukan evaluasi terhadap sudah tepatkah pelaksana dari kebijakan tersebut dan konsekuensinya adalah jika kebijakan efektif mengatasi permasalahan dan dianggap baik maka dipertahankan sedangkan jika dianggap tidak efektif dilakukan perumusan kebijakan baru yang lebih baik.

## ABSTRACT

Maghfur Hidayat Nur, NIM. 1751144014. 2016. *“The Policy of Kiai in the Development of Formal Education (Study of Multi Site at Islamic Senior High School Al-Marif Boarding School Panggung and Islamic senior High School Sunan Gunung Jati Boarding School Hidayatul Mubtadi-Ien ”*Thesis Management of Islamic Education (MPI), Pascasarjana Program (S-2) IAIN Tulungagung under the guidance by **Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag** and **Dr. Maftukhin, M.Ag**.

Keywords: Kiai Policy, Development.

This research is motivated by a strong tendency of pesantren to consolidate institutional organizations, particularly in aspects of leadership and management. Institutional development of pesantren, mainly due to the diversification of the convening of education, which also includes public schools and madrasahs which adopts a more rational, open and democratic. The division of authority in the management of the maintenance of regulated functionally, so that eventually all must be contained and driven by modern management rules and regulations. Pesantren with the institutional status of the foundation is the highest institution which became a legal entity and from the units of education in. Each unit activity is handled by those responsible for each, where each person in charge of the hierarchically accountable to higher unit. Each unit was given some autonomy to organize their own households. Leadership foundation with its structure is a collective leadership with the duties and authorities of each entity in the structure of the foundation.

The focus of research are: (1) How do policy agenda for clerics in the development of formal education in Islamic Senior High School Al Ma'arif and Senior High School Islam Sunan Gunung Jati? (2) How the policy formulation in the development of formal education in Senior High School Al Ma'arif and Senior High School Islam Sunan Gunung Jati? (3) How is the adoption of policies in the development of formal education in Senior High School Al Ma'arif and Senior High School Islam Sunan Gunung Jati? (4) How is the implementation of policies in the development of formal education in Senior High School Al Ma'arif and Senior High School Islam Sunan Gunung Jati? (5) How is the evaluation of the development of formal education in Senior High School Al Ma'arif and Senior High School Islam Sunan Gunung Jati?

This thesis is helpful to provide a repertoire of scientific theories and concepts on policy making as well as an alternative solution to the policy making process in an organization at boarding school. And to give consideration to the Islamic boarding school Foundation Board in determining policies oriented to development.

From these results, the authors concluded that: (1) policy agenda chaplain in the development of formal education will be successful if it does not just rely chaplain initiative but also the input of the board of formal educational institutions and direct observation of actual field conditions. (2) The formulation of policy kiai

in the development of formal education will be effective when carried out in accordance with the scale of priority with the vision and mission considerations that have been prepared. (3) The adoption of policy development chaplain education should not only rely on their own initiative but input from administrators of institutions and the other priest. (4) The implementation of policies chaplain, among others; kiai authorize formal educational institutions to implement policies scholars who have been decided, the implementation of the policy is disseminated through meetings with institutions in order to stabilize the flow of information on the policies to be implemented, all have been arranged in the structure and has the duty and authority of each. (5) Policy evaluation clerics in the development of formal education in schools should not only through meetings alone but can by inspection to formal educational institutions.

## الملخص

مغفور هدايت نور، نيم. ٢٠١٦. ١٤. ١٤٤٤. ١٧٥١١٤٤. "سياسة كبي في تطوير التعليم النظامي (متعدد موقع الدراسة في المدارس الداخلية معاريف المدارس الداخلية فأنجوج وسماي الإسلام سنن كونوع جاتى هيداياتول موبتادي-يان" الإسلامية التعليم إدارة أطروحة (MPI)، مدرسة الدراسات العليا (S-2) إيان تولونغاغونغ تحت الاسراف من الأستاذ الدكتور الإمام فوعدي المحستر والدكتورالحج، مافتوخين المحستر،.

الكلمات الرئيسية: سياسة كبي، والتنمية.

البحث في هذا طريق الترعات تيسيبي أقوىاء من الصعود إلى توحيد المنظمات المؤسسية، لا سيما في جوانب القيادة والإدارة. التطوير المؤسسي لهذا مدرسة داخلية، أساسا بسبب وجود تنوع التعليم المتري، الذي يشمل أيضا مدرسة ونظام المدارس العامة التي احتضنت أكثر عقلانية، ديمقراطية وانفتاحا. تقسيم السلطة في الحكم الحكم يتم تعيين وظيفيا، حتى كل ما حصلت أخيرا تتعهد ومدفوعة وفقا للقواعد النحوية للإدارة الحديثة. مدرسة داخلية مع الوضع المؤسسي للمؤسسة هو أعلى مؤسسة أن يصبح كيانا قانونيا والأصل للوحدات التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كل وحدة من النشاط يتولى الشخص المسؤول عن كل منها، حيث كل الشخص المسؤول مسؤولاً إلى وحدات ذات تسلسل هرمي. وتعطي كل وحدة النوع من الاستقلال الذاتي لتنظيم أسرهن. قيادة المؤسسة مع هيكل المنظمة هو القيادة الجماعية مع مهام وصلاحيات كل هيئة في هيكل المؤسسة.

يتم تركيز البحث في كتابة هذه الأطروحة: كيف (١) إعداد جدول أعمال السياسة كياي في تطوير التعليم النظامي في مدرسة عليا موقع معاريف و SMA الإسلام سنن كونوع جاتى؟ (٢) كيفية صياغة السياسات في تطوير التعليم النظامي في مدرسة عليا موقع معاريف و SMA الإسلام س سنن كونوع جاتى؟ (٣) كيف يمكن اعتماد سياسات في تطوير التعليم النظامي في مدرسة عليا موقع معاريف و SMA الإسلام سنن كونوع جاتى. . (٤) كيفية تنفيذ السياسات في تطوير التعليم النظامي في مدرسة عليا موقع معاريف و SMA الإسلام سنن كونوع جاتى؟ (٥) كيفية تقييم تطوير التعليم النظامي في مدرسة عليا بن-معاريف و SMA الإسلام سنن كونوع جاتى؟

هذه الأطروحة مفيدة لإعطاء الإحضرار العلمية من النظريات والمفاهيم حول استيعاب السياسات، فضلا عن العملية لجعل الحلول البديلة في منظمة في المدارس الداخلية. وكذلك إيلاء الاعتبار "المجلس التنفيذي" للمدارس الداخلية أساسا في تحديد السياسات لتنمية العملاء مدفوعة من نتائج هذا البحث، استنتج المؤلفون أن: كيباي بينيوسونا (١) السياسة العامة جدول الأعمال في تطوير التعليم الرسمي يكون ناجحاً إذا أمّا لا تعتمد فقط على بناء على مبادرة كيباي وحدها بل أيضا الإدخالات من المؤسسات الرسمية "المجلس التنفيذي" والملاحظة المباشرة ضد الظروف (٢) صياغة السياسات في تطوير بينديدكان كيباي الرسمي سيكون من المناسب الميدانية الفعلية. عند القيام به وفقا لجدول الأولويات مع النظر في رؤيتها ومهمتها التي تم تحويلها برمجياً. (٣) اعتماد سياسة لتطوير التعليم ينبغي أن لا تعتمد فقط على كيباي ميليكان المبادرة الخاصة مساهمة (٤) تنفيذ هذه السياسة قد كيباي؛ كيباي من "المجلس التنفيذي" للمؤسسة، فضلا عن سائر كيباي. الإذن للمؤسسات الرسمية لتنفيذ السياسات التي كانت قررت كيباي، اجتماعيا تنفيذ هذه السياسة من خلال الاجتماع جنبا إلى جنب مع المؤسسات من أجل ميمانتاباكان تدفق المعلومات المتعلقة بالسياسات التي يتعين تنفيذها، كل قد تيرسوسوسن في الهيكل ورئيس واجبات وسلطات كل (٥) تقييم السياسة داخل بينجيمباناجان كيباي التعليم الرسمي في المدارس الداخلية ينبغي منها. ليس فقط من خلال الاجتماعات وحدها ولكن يمكن مع عمليات التفتيش بمؤسسة بينديدياكن الرسمية.